

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 3 Agustus 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A	Kota Cimahi	
	1	Stimulus Penanganan Covid-19 Baru Terserap Rp 68 M
		<i>Galamedia/Hal. 4</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Stimulus Penanganan Covid-19 Baru Terserap Rp 68 M

Entitas / Cakupan : Kota Cimahi

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 4

Edisi : Senin, 3 Agustus 2020

**Achmad, "Dari Total Anggaran Rp 195 Miliar
Stimulus Penanganan Covid-19
Baru Terserap Rp 68 M**

CIMAHI, (GM).-

Anggaran stimulus penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Cimahi baru terserap Rp 68 miliar atau 35 persen dari total anggaran sekitar Rp 195 miliar. Anggaran yang masih tersisa menunggu petunjuk dari pemerintah pusat berdasarkan perkembangan kasus Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana melalui sambungan telepon, Ahad (2/8). Achmad mengungkapkan, hasil refocusing dan realokasi anggaran tahun ini yang masuk dalam biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan virus corona di Kota Cimahi mencapai sekitar Rp 195 miliar. "Hingga saat ini, baru terealisasi 35 persen atau sekitar Rp 68

miliar," terang Achmad.

Menurutnya, refocusing dan realokasi anggaran merupakan arahan langsung dari pemerintah pusat. Anggaran tersebut dipangkas dari program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cimahi. Anggaran yang terkumpul sepenuhnya untuk penanganan dan penanggulangan dampak dari virus korona. "Jadi, yang refocusing dari SKPD seperti dari belanja modal, belanja barang dan jasa difokuskan ke BTT," jelas Achmad.

Achmad melanjutkan, anggaran BTT yang sudah terserap digunakan untuk berbagai penanganan Covid-19. Di antaranya untuk belanja Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau bantuan untuk masyarakat terdampak, serta

pengadaan di bidang kesehatan. "Misalnya, pengadaan alat rapid test, APD (alat pelindung diri)," ucapnya.

Anggaran BTT tersisa yakni sekitar Rp 127 miliar, beber Achmad, pihaknya menunggu petunjuk dari pemerintah pusat berdasarkan perkembangan kasus virus corona. Namun jika tidak terserap tahun ini, maka akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

Pemulihan ekonomi

Anggaran yang sudah masuk dalam BTT penanganan virus corona, tegas Achmad, sementara ini tidak bisa dialihkan untuk keperluan lain, kecuali sudah ada arahan dari pemerintah pusat. Seperti BTT bisa dialihkan untuk kegiatan lain, karena pandemi Covid-19 sudah berakhir misalnya.

"Tapi kami belum ada arahan ke arah sana. Kita bergantung keputusan pusat saja, dan lihat perkembangan. Mudah-mudahan kasusnya menurun, status daruratnya dicabut," katanya.

Menurutnya, dalam APBD Perubahan nanti pun hanya akan mengesahkan perubahan-perubahan anggaran yang sudah dilakukan akibat pandemi virus corona. Pasalnya, semua SKPD mengalami perubahan anggaran dari yang sudah disepakati dalam program awal tahun 2020.

Perihal anggaran untuk pemulihan ekonomi, lanjut Achmad, masih dilakukan pembahasan bersama SKPD terkait untuk mencari formulasi penanganannya. "Kita lihat formulasinya seperti apa, harus disepakati," ujarnya. **(B.110)****